

SURVEI INTEGRITAS PUBLIK

Pengukuran Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Jakarta, 23 Juli 2013



1. Tugas KPK

2. Latar Belakang Survei Integritas

3. Variabel Indikator Survei Integritas

4. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik

5. Pergerakan Nilai Survei Integritas

I. Tugas KPK

Pasal 7 dan pasal 8 UU 30/2002 :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas untuk melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap institusi yang melaksanakan pelayanan publik

Pasal 14 UU No. 30/2002:
KPK bertugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dengan antara lain “melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah” UU 30/2002.

II. Latar Belakang Survei Integritas

- Pendekatan : mencari akar permasalahan korupsi dalam layanan publik
- Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan).
- Membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi
- Mendorong lembaga publik untuk melakukan upaya aktif pencegahan korupsi
- Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik, sebagai mekanisme *check & balances* antara penyedia dan pengguna layanan publik (Keberpihakan kepada Masyarakat)

Responden Survei

Responden :

- pengguna langsung unit layanan publik disurvei dalam 1 tahun terakhir
- Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu lembaga/institusi (tidak termasuk calo)

Responden Survei (2012)

INSTANSI PEMDA

- 60 Pemerintah Daerah
- 180 Unit Layanan (KTP, IMB dan SIUP)
- Sampel sebanyak 5.640 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan)

INSTANSI VERTIKAL

- 5 Instansi Vertikal di 33 Kota
- 8 Unit Layanan Vertikal (total 264 unit layanan)
- Sampel sebanyak 8.160 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)

INSTANSI PUSAT

- 20 Instansi Pusat
- 40 Unit Layanan
- Sampel sebanyak 1.200 responden

TOTAL

- 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah
- 484 Unit Layanan
- Sampel sebanyak 15.000 (rata-rata 30 responden per unit layanan kecuali Jakarta)

III. Variabel dan Indikator Survei Integritas

- **Pengalaman Integritas:**

Merefleksikan persepsi dan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden)

- **Potensi Integritas:**

Merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor2 yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang)

Semakin tinggi skor integritas, kemungkinan pengguna layanan mengalami korupsi dan menilai potensi korupsi di layanan publik yang mereka datangi semakin kecil (Skor 0 -10)

Variabel dan Indikator Survei Integritas

INTEGRITAS	VARIABEL	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	
Integritas Total (1.00)	Pengalaman Integritas (0.667)	Pengalaman Korupsi (0.250)	Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)	
			Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)	
			Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)	
		Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)	Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)	
	Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)			
	Potensi Integritas (0.333)	Lingkungan Kerja (0.127)	Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)	Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
				Keterlibatan Calo (0.221)
				Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
				Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
				Sistem Administrasi (0.280)
		Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)		
		Perilaku Individu (0.280)	Keadilan dalam Layanan (0.413)	
				Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
		Pencegahan Korupsi (0.313)	Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)	Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

Pengalaman Integritas

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Pengalaman Integritas (0,667)	6,89	Pengalaman Korupsi (0.250)	6,98	Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)	6,52
				Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)	7,18
				Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)	6,93

Pengalaman Integritas 2012

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Pengalaman Integritas (0,667)	6,89	Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)	6.86	Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)	6.67
				Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)	6.93

Potensi Integritas

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Potensi Integritas (0,333)	5,34	Lingkungan Kerja (0.127)	7,11	Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)	5.43
				Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)	9.51
				Keterlibatan Calo (0.221)	7.77
				Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)	7.68
				Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)	7.58

Potensi Integritas

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Potensi Integritas (0,333)	5,34	Sistem Administrasi (0.280)	5.99	Kepraktisan SOP(0.281)	6.57
				Keterbukaan Informasi (0.584)	5.84
				Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)	5.39

Potensi Integritas

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Potensi Integritas (0,333)	5,34	Perilaku Individu (0.280)	6,24	Keadilan dalam Layanan (0.413)	7.16
				Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)	5.98
				Perilaku Pengguna Layanan (0.260)	5.11

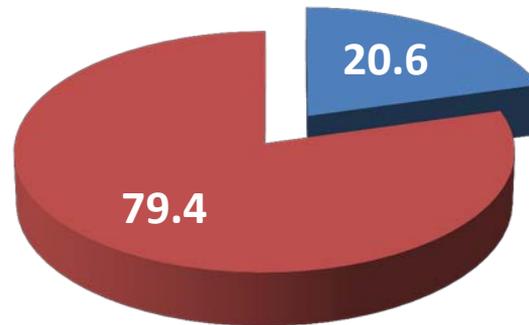
Potensi Integritas

Indeks Integritas Nasional 2012: 6,37

Potensi Integritas (0,333)	5,34	Pencegahan Korupsi (0.313)	3.23	Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)	3.02
				Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)	3.87

IV. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik: Pengalaman Integritas

Apakah biaya total yang Anda keluarkan sesuai dengan biaya resmi layanan? (dalam %)

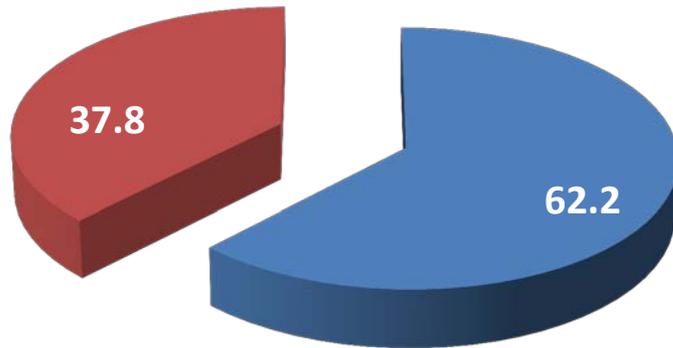


■ Tidak Sesuai

■ Sesuai

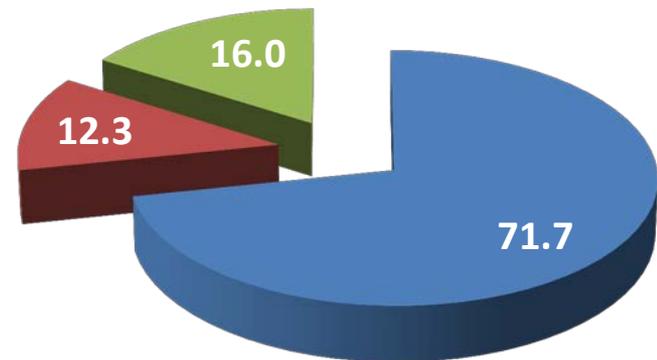
Pengalaman Integritas

Berapa persentase biaya tambahan terhadap biaya resmi? (%)



■ > 50% ■ < 50%

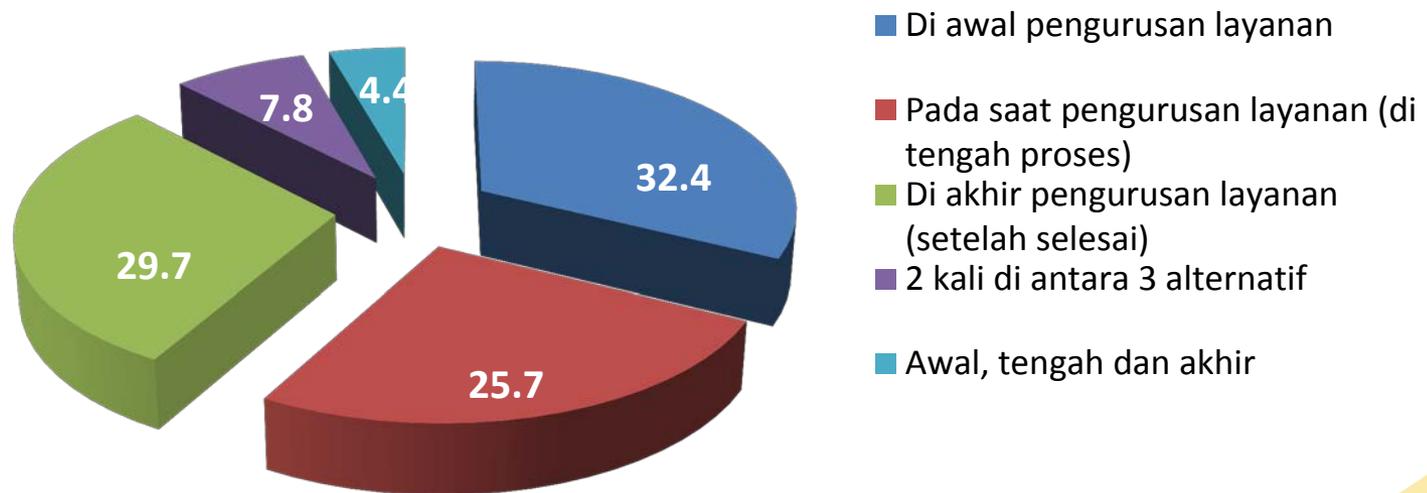
Berapa kali Anda memberikan biaya tambahan untuk pengurusan layanan? (%)



■ 1kali ■ 2 kali ■ Lebih dari 2 kali

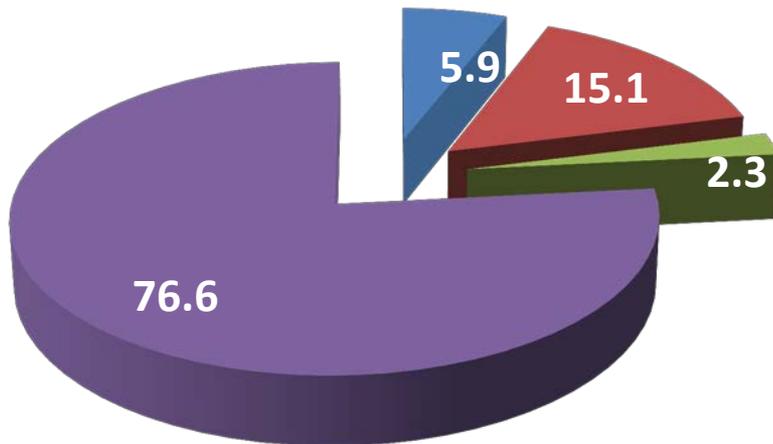
Pengalaman Integritas

Kapan uang tambahan diberikan? (%)



Potensi Integritas

Berapa jumlah calo/perantara pada unit layanan? (%)



- Lebih dari 5 orang
- 2 – 5 orang
- 1 orang
- Tidak pernah melihat keberadaan calo

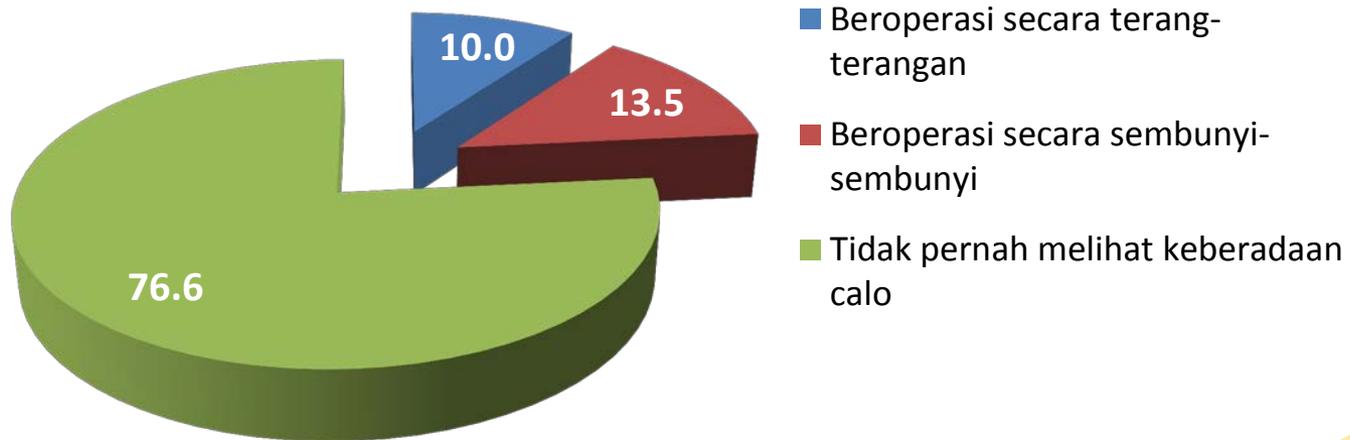
Siapa yang Berperan Menjadi Calo/Perantara (%)



- Petugas langsung unit layanan
- Petugas lain di instansi tersebut
- Orang yang beraktivitas/bekerja di sekitar unit layanan tersebut
- Orang luar

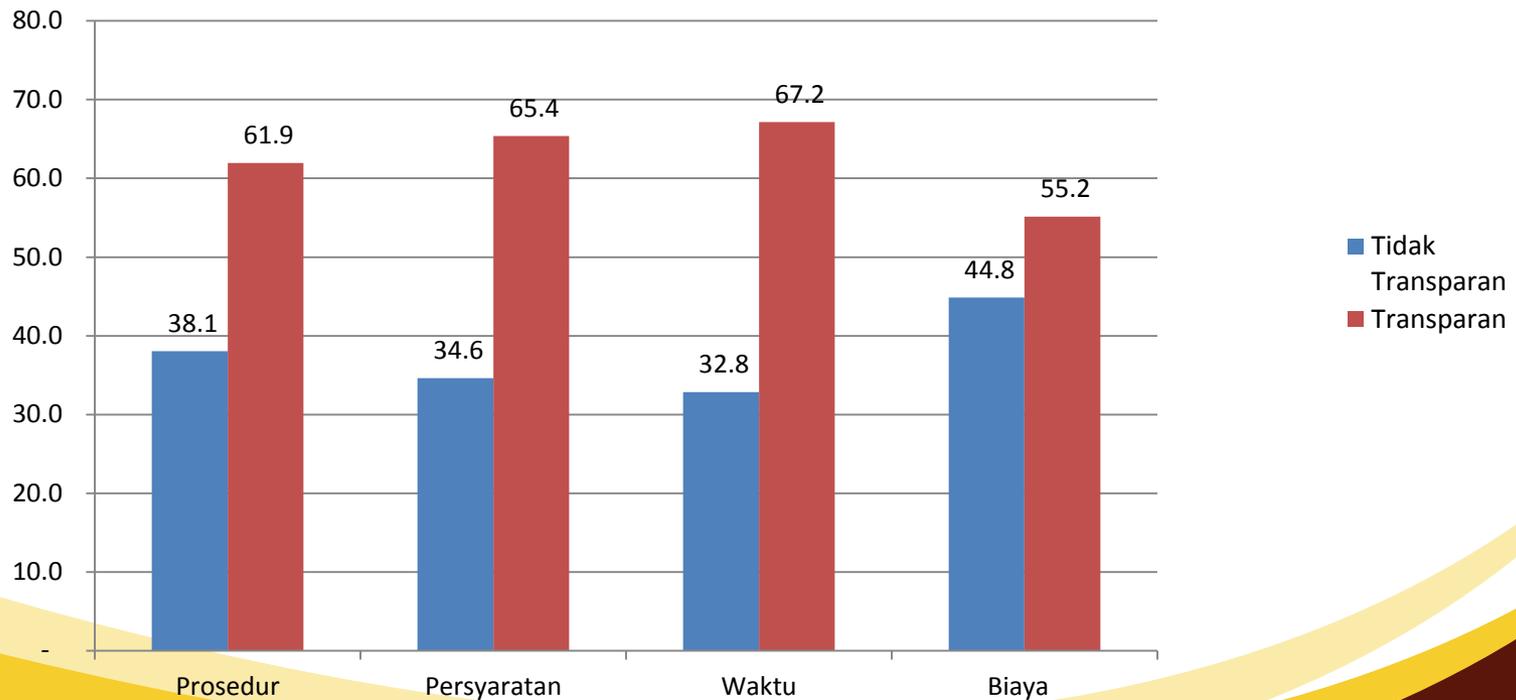
Potensi Integritas

**Bagaimana cara calo/perantara beroperasi?
(%)**



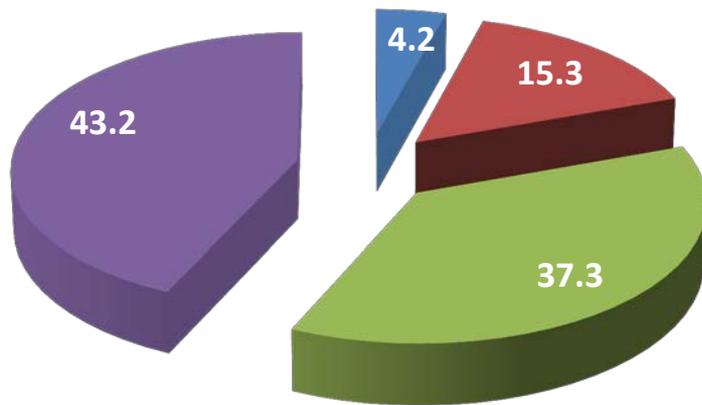
Potensi Integritas

Bagaimana tingkat keterbukaan informasi di unit layanan? (%)



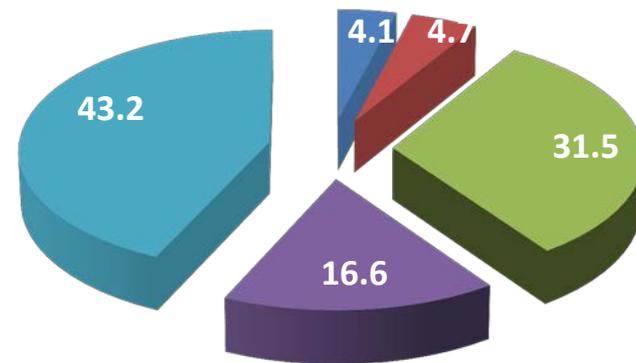
Potensi Integritas

Bagaimana kondisi dari perangkat sistem teknologi Informasi pada unit layanan (%)



- Tidak berfungsi
- Berfungsi sebagian
- Berfungsi seluruhnya
- Tidak ada teknologi informasi di unit layanan

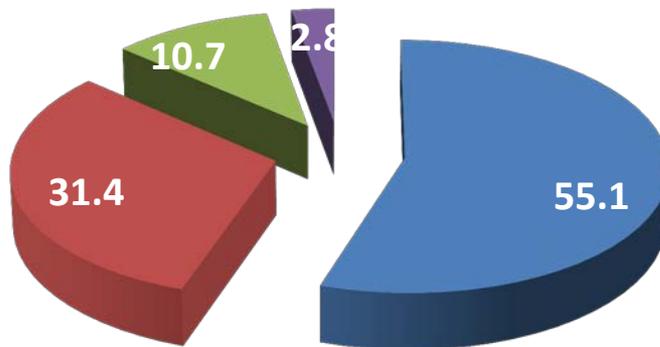
Apakah Anda pernah memanfaatkan teknologi informasi? (%)



- Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi
- Tidak tahu cara penggunaanya karena tidak pernah dijelaskan
- Tidak pernah karena tidak memerlukan
- Pernah
- Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi

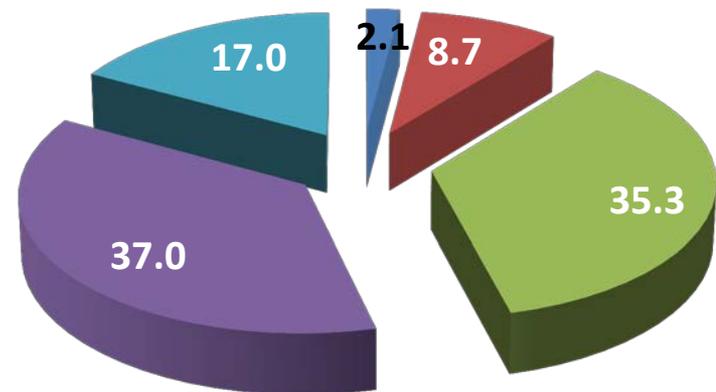
Potensi Integritas

Apakah unit layanan menyediakan media pengaduan? (%)



- Tidak ada media pengaduan
- Terdapat satu media pengaduan
- Terdapat dua media pengaduan
- Terdapat lebih dari dua media pengaduan

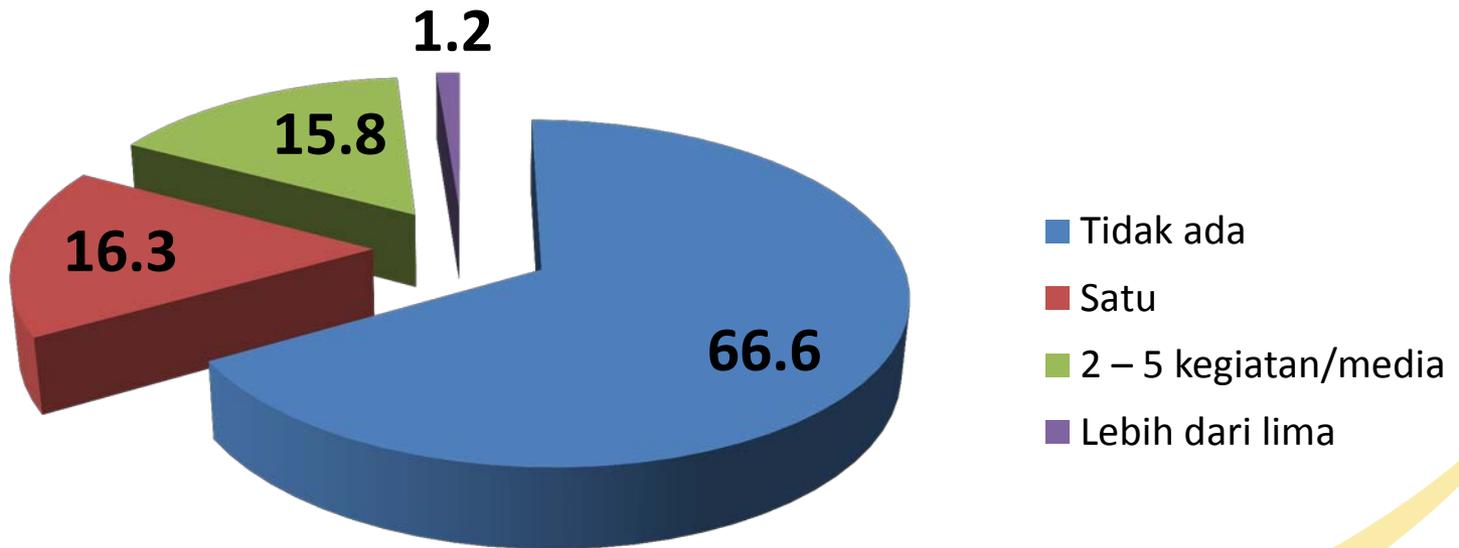
Bagaimana tindak lanjut/respon petugas terhadap pengaduan? (%)



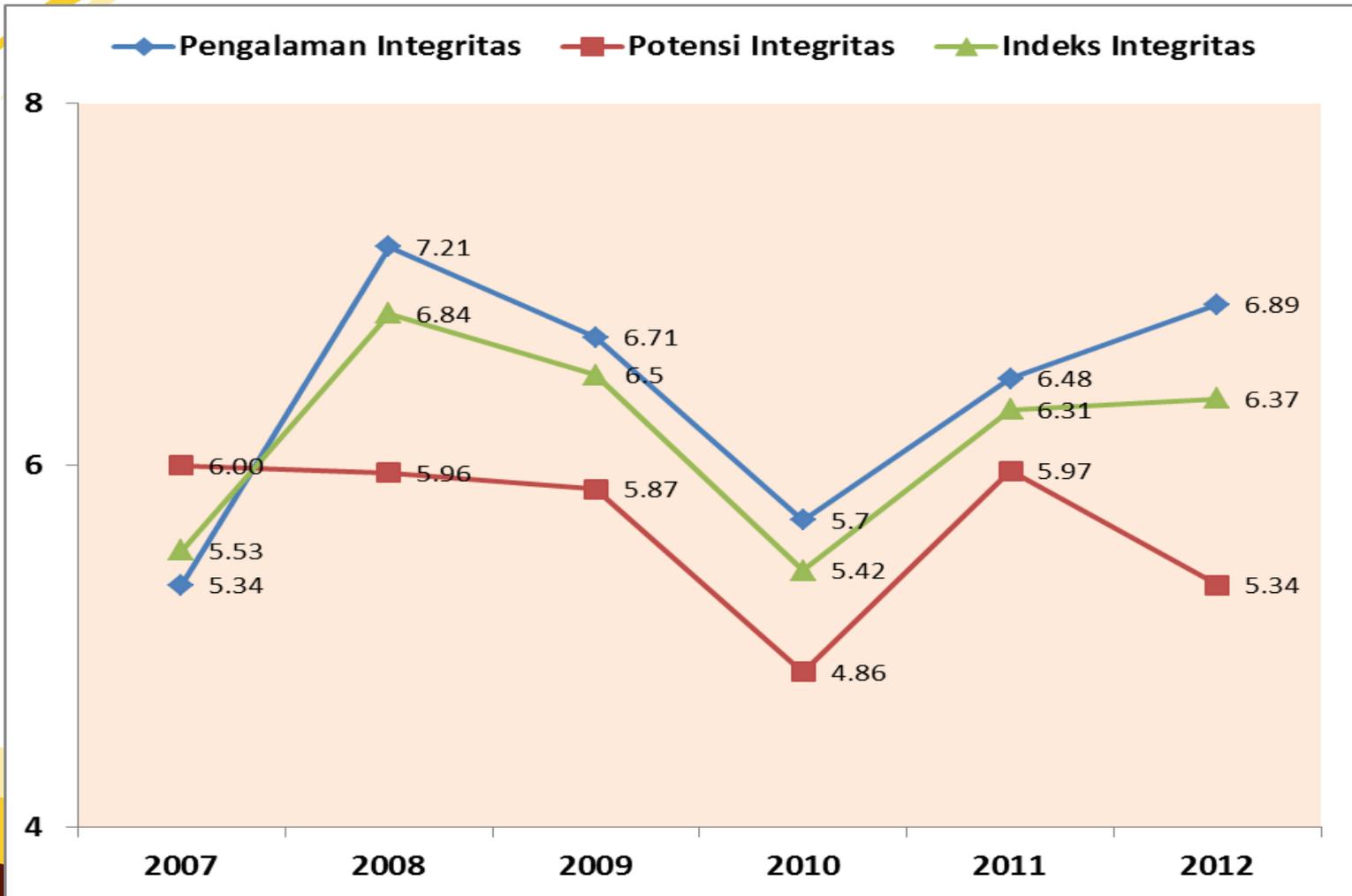
- Pengaduan ditolak
- Pengaduan ditampung
- Pengaduan ditanggapi
- Pengaduan ditindaklanjuti
- Pengaduan diabaikan

Potensi Integritas

Berapa banyak Anda melihat kegiatan/media
Anti Korupsi di Unit Layanan? (%)



V. Pergerakan Nilai Survei Integritas 2007-2012



IIN Tahun 2012

Instansi/Pemda dengan Skor Total Integritas > 7

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	Total Pusat/ Vertikal/ Daerah
1	PT. Jamsostek	8.02	6.44	7.49
2	Pemko Bitung	7.60	7.16	7.45
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8.06	6.15	7.43
4	Pemko Pare-pare	7.57	7.11	7.41
5	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.63	6.62	7.29
6	Badan Pengawas Obat dan Makanan	7.59	6.54	7.24
7	Pemko Banjarbaru	7.29	6.71	7.10
8	Kementerian Kesehatan	7.62	5.97	7.07
9	Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.59	5.91	7.03
10	Kementerian Perdagangan	7.10	6.88	7.03
11	Pemko Banda Aceh	7.76	5.52	7.01

IIP Tahun 2012

Unit Layanan Instansi Pusat dengan Skor Total Integritas > 7

No.	Unit Layanan	Instansi	Indeks Integritas		
			Pengalaman	Potensi	Total Unit Layanan
1	Layanan Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari tua	PT. Jamsostek	8.03	6.36	7.47
2	Layanan Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja	PT. Jamsostek	8.01	6.37	7.46
3	Layanan Penyetaraan Ijasah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8.04	6.30	7.46
4	Akreditasi Program Studi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8.09	5.99	7.39
5	Persetujuan Impor	Kementerian Perdagangan	7.46	7.15	7.36
6	Izin Usaha	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.64	6.68	7.32
7	Pelayanan Jasa Pengujian	Badan Pengawas Obat dan Makanan	7.63	6.61	7.29
8	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.70	6.37	7.25
9	Pendaftaran Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.61	6.40	7.21
10	Pelayanan Jasa Sertifikasi	Badan Pengawas Obat dan Makanan	7.55	6.43	7.18
11	Layanan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura	Kementerian Pertanian	7.50	6.46	7.15
12	Lembaga Penyalur Dana Bergulir	Kementerian Koperasi dan UKM	7.53	6.38	7.15
13	Izin Edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)	Kementerian Kesehatan	7.61	6.12	7.11
14	Surat Ijin Pengerahan (SIP)	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	7.34	6.57	7.09
15	Pengolahan Limbah Radioaktif	Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.63	5.89	7.05
16	Sertifikasi Personel	Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.56	6.02	7.05
17	Izin Penyalur Alkes	Kementerian Kesehatan	7.64	5.83	7.04
18	Layanan Angkutan Kota Antar Propinsi	Kementerian Perhubungan	7.34	6.34	7.01
19	Pelayanan Pengelolaan Properti Bandara	PT. Angkasa Pura II	7.71	5.57	7.00

Kesimpulan

KPK dalam perannya sebagai *trigger mechanism* sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.